

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Warga Negara

1. Pengertian Warga Negara

Menurut As-Hikam (2022) warga negara sebagai terjemahan yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship. Kata tersebut memiliki makna sebagai anggota yang menjadi bagian dari sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara itu sendiri. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota suatu negara itu sendiri.

Menurut Koerniatmanto S., mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara, yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seorang warga negara memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara tersebut berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958 menyatakan, bahwa warga negara RI atau warga negara Republik Indonesia merupakan sekelompok orang yang memiliki dasar undang-undang serta maupun perjanjian-perjanjian serta maupun peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang 1945 istilah warga negara terbagi menjadi dua kategori, yang terdiri dari warga negara asli atau pribumi dan warga negara asing atau *vreemdeling*. Hal ini secara yuridis diatur berdasarkan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 dan perubahannya, yaitu warga negara asli dan asing. Berikut penjelasannya:

- a. Warga negara asli atau pribumi merupakan penduduk asli sebuah negara tersebut. Seperti contohnya warga negara Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Minangkabau, Toraja, Bali, Aceh, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lain.
- b. Warga negara asing atau *vreemdeling* merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut. Seperti pada contohnya

warga negara Indonesia yang berasal dari suku Cina, India, Belanda, Eropa, Arab, dan masih banyak lagi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak serta kewajiban warga negara, diantaranya yaitu:

- a. Pada pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa dalam menjadi warga negara memiliki pengertian yaitu sekelompok orang bangsa Indonesia asli serta kelompok orang bangsa lain yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, pada ayat 2 syarat yang ada mengenai kewarganegaraan ditetapkan melalui undang-undang.
- b. Pada pasal 27 ayat 1, dijelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum serta sistem pemerintahan yang ada, dan sebagai warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang ada tersebut. Selanjutnya, pada ayat 2 setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak sebagai manusia.
- c. Pada pasal 28, dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kemerdekaan berserikat serta berkumpul, maupun mengeluarkan pikiran secara lisan, dan sebagainya yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.
- d. Pada pasal 30 ayat 1, dijelaskan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam partisipasi ikut serta membela negara. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan juga bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Menurut Margaret S. Branson (1999, hlm 8) terdapat tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu “*Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (kecakapan kewarganegaraan), dan *Civic Dispositions* (karakter kewarganegaraan)”. Dengan demikian, muatan Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan bekal yang baik bagi warga negaranya, dimulai dari pengetahuan, kecakapan serta karakter atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu. Menurut Margaret S. Branson (1999, hlm 8) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga

negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi) Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum.

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Margaret S. Branson (1999, 23) menegaskan bahwa *civic dispositions* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter-karakter warganegara sebagaimana kecakapan warganegara, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civic society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, serta negosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

2. Pengertian Peran

Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 21) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada

fungsi seseorang dalam menyesuaikan diri dan sebagai sebuah proses atau lebih tepatnya adalah ketika seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat atau sosial serta menjalankan suatu peranan.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keadaan terlibat yaitu adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu”. (Depdikbud, 2006, hlm 668). Peran adalah kondisi di mana individu sepenuhnya melibatkan diri dalam pekerjaan atau aktivitas mereka. (William Kahn, 1990, hlm 692). Japarianto dan Sugiharto (2013) dalam O’Cass (2005) mendefinisikan Peran sebagai niat atau bagian motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditujukan melalui ciri penampilan. Zaichkowsky (1985) seperti dikutip Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan Peran sebagai hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ketertarikan.

Peranan berasal dari kata peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 25) adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan Menurut Biddle dan Thomas peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku- perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran memberi penilaian memberi sanksi dan lain-lain.

3. Pengertian Peran Warga Negara

Peran warga negara merupakan kegiatan untuk membuat perubahan dalam kehidupan warga ataupun komunitas dan mengkombinasikan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi guna membuat perubahan

tersebut. Tindakan ini merupakan usaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat, baik melalui proses politik maupun non politik. (Kaye, 2010)

Peran warga negara sering disebut juga dengan istilah *civic participation*, yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan warga negara baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan berbagai macam kegiatan dalam lingkungan masyarakat. Menurut Syaifullah (2015, hlm 27), Peran warga negara merupakan salah satu konsep utama dalam *community civic* yang menekankan pada peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Peran sipil merupakan praktik demokrasi sebagai bentuk pelayanan masyarakat dalam hal pembangunan yang terdiri dari partisipasi dalam pengembangan sosial politik, (Lenzi, Vieno, Pastore, dan Santinello, 2013). Penelitian lain yang berkaitan dengan Peran warga negara yaitu penelitiannya (Piang, dkk., 2017) dalam penelitiannya menjelaskan tentang Peran warga negara yang berkaitan dengan nilai moral dan menjadi warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang multi- etnis. Dalam pembentukan partisipasi warga negara oleh karena itu warga negara harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Keow & Chan, 2015).

Selanjutnya pengertian peran warga negara yang dilansir oleh *teachingchannel.org* yaitu: *“Means young people feeling empowered to advocate for themselves and their community and working with others to try and implement their vision of the future. Civic engagement requires a number of traditional academic skills, like discussion and problem solving, along with other skills and dispositions that aren't always valued in the era of high stakes testing, such as hope, optimism, resiliency, and creativity”* berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara sederhana Peran warga negara merupakan Peran warga negara berarti kaum muda yang merasa diberdayakan untuk melakukan advokasi bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka dan bekerja dengan orang lain untuk mencoba dan mengimplementasikan visi mereka tentang masa depan. Peran masyarakat membutuhkan sejumlah

keterampilan akademis tradisional, seperti diskusi dan penyelesaian masalah, bersama dengan 11 keterampilan dan disposisi lain yang tidak selalu dihargai di era pengujian taruhan tinggi, seperti harapan, optimisme, ketahanan, dan kreativitas. Menurut Adler dan Goggin (2019, hlm 249), Peran warga negara menggambarkan bagaimana warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas untuk orang lain atau untuk membantu membentuk masyarakat. Peran warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat.

Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (*national character building*) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu bangsa-negara (*nation-state*). Untuk membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizens*) tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003).

Salah satu pelajaran yang mengemban misi membangun karakter warga negara yang baik adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan atau (*civics education*) mengemban misi untuk membentuk siswa agar kelak menjadi warga masyarakat sekaligus warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Pada tataran kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya, sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Branson (1999, hlm 8-25) menegaskan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). Diantara aspek-aspek *civic competences* tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik.

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999, hlm 23). *Civic disposition* merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic competences*) yang disampaikan oleh Branson (1999, hlm 8-25) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Civic knowledge* berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek dari *civic knowledge* ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. *National Center for Learning and Citizenship* (NCLC) (dalam Winarno 2012, hlm 108) menyatakan, *civic knowledge* berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya. Adapun komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut John J. Patrick and Thomas S. Vont sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan.

2. Menganalisis dan menjelaskan fenomena.
 3. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu publik.
 4. Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan masyarakat.
 5. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan.
- b. *Civics skill* atau kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah- masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*) (Branson, 1999, hlm 8-20). Branson (1998, hlm 17) dalam Winarno (2012, hlm 145) menyatakan sebagai berikut; Jika warga negara mempratikkan hak- haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan parsipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu. Kecakapan- kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual itu meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu Branson (1998) dalam Winarno (2012, hlm 146). Adapun tabel kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) diantaranya:

1. Kecakapan intelektual (*intellectual skills*)
 - a) Mengidentifikasi (*identifying*)
 - b) Menggambarkan (*describing*)
 - c) Menganalisis (*analyzing*)
 - d) Menilai (*evaluating*)
2. Kecakapan partisipasi (*participation skills*)
 - a) Berinteraksi (*interacting*)
 - b) Memantau (*monitoring*)
 - c) Memengaruhi (*influencing*)

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

Isi dari *civic skills* ada dua, yaitu *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participatory skills* (kecakapan partisipasi). *The National Standards of Civic and Government dan The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* (dalam Winarno 2012, hlm 150) membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini. Kecakapan-kecakapan intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Diknas (2004) dalam Winarno (2012, hlm 161).

c. *Civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kompetensi karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua kompetensi sebelumnya. Dalam deskripsinya Quigley, dkk (1991, hlm 11) menyebut *civics disposition* sebagai “*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to healthy functioning and common good of the democratic system*” atau “sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi”. *Civics disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. (Branson, 1999, hlm 23). Karakter kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Terdapat dua hal karakter yang harus diperhatikan dari *civics disposition* ini diantaranya yaitu:

1. Karakter privat

Karakter privat ini seperti bertanggung jawab, moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib.

2. Karakter publik

Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Secara ringkas karakter publik dan privat sebagaimana disampaikan oleh Branson (1999, hlm 23-25) dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.

Artinya bahwa Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung-jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar, menerima tanggung-jawab akan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat demokratis

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Artinya bahwa Tanggung-jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, memberi nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, voting, membayar pajak, menjadi juri di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Artinya bahwa Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warganegara dan mengikuti aturan "prinsip mayoritas" namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

Artinya bahwa Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan pilihan (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila dipedukan. Juga membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warganegara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Artinya bahwa Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor Keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana.

Pentingnya karakter kewarganegaraan ini jarang sekali di tegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam Margaret S. Branson, dkk (1999, hlm, 26) mengungkapkan pentingnya karakter kewarganegaraan ini dalam kata-katanya yang sekarang jadi populer:

“kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.”

B. Tinjauan tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Menurut Rulli Nasrullah (2020, hlm 3) Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (Laughey, 2007 dan McQuail, 2003). Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata "media", yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan

teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media audio-visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan.

Menurut Rulli Nasrullah (2020, hlm 3) Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan kata "media" bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri (Meyrowitz, 1999, Moores 2005 dan Williams, 2003). Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, organ, dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah objek dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar atau visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa media sosial pada masa sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai alat komunikasi dengan mudah, selain itu media sosial menjadi sumber informasi dari berbagai sumber yang disajikan baik dari website mau aplikasi yang bisa diakses melalui media online, dan media sosial sekarang sudah menjadi kebutuhan semua kalangan dalam memenuhi kehidupan.

Menurut Cahyono (2016) media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis website yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

2. Sejarah Media Sosial

Media Sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2002 Friendster merajai media sosial karena hanya Friendster yang mendominasi Media Sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan media sosial dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah media sosial diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya

sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). GeoCities merupakan media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai Media Sosial karena hanya Friendster yang mendominasi Media Sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan Media Sosial dengan keunikan dan karakteristik masing-masing.

Sejarah Media Sosial diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirinya website- website.

Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah Media Sosial pertama yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi Media Sosial yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai Media Sosial dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Wiser, Google+ dan lain sebagainya.

Media Sosial juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti Social Media Maintenance, Social Media Endorsement dan Social

Media Activation. Oleh karena itu, Media Sosial kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh *Digital Agency*.

3. Karakteristik Media Sosial

Menurut Rulli Nasrullah (2020, hlm 15) Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Bukan berarti tidak ada karakter umum atau makro, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini dipandang perlu untuk melihat perbedaan dengan media lainnya (Castells, 2004 Talalay et al., 1997, Thurlow, Lengel, & Tomic, 2004).

Dapat disimpulkan media sosial mempunyai karakteristik dalam beberapa media siber, dimana menjadi kebutuhan dalam sarana sosial di dunia virtual, dengan adanya kemudahan media sosial orang yang sedang berjarak jauh bisa berkomunikasi dengan mudah melalui media sosial yang sangat canggih di masa sekarang, dan sangat mudah diakses melalui jaringan. Pada akhirnya, bagaimana karakteristik media sosial itu bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran, politik. Menurut Rulli Nasrullah (2020, hlm. 16) Adapun karakteristik media sosial, yaitu:

- a) Jaringan (*network*).
- b) Informasi (*information*).
- c) Arsip (*archive*).
- d) Interaksi (*interactivity*).
- e) Simulasi sosial (*simulation of society*).
- f) Konten oleh pengguna (*user-generated content*).

4. Fungsi Media Sosial

Menurut Djarijah (2022, hlm 6) Fungsi media sosial adalah Sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini, media sosial berhasil menghubungkan hampir setiap orang yang memiliki akses internet. Beberapa fungsi media sosial menurut Umam (2020) sebagai berikut:

1. Komunikasi

Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik baik bagi pengguna. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi, media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi.

2. Branding

Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing.

3. Marketing

Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Dapat disimpulkan dalam media sosial memiliki fungsi yang sangat menguntungkan dalam pgunanya jika bijak dalam menggunakan media sosial dengan mencari hal positif sebagai sumber informasi yang cepat dan akurat, selain sebagai media komunikasi, media sosial bisa dijadikan sebagai usaha branding nama agar terkenal dan memanfaatkan media

sosial sebagai marketing yang sangat efektif karena media sosial sekarang bisa diakses oleh seluruh kalangan.

5. Dampak Media Sosial

Menurut Djarijah (2022, hlm 15) Penggunaan media sosial pada masa sekarang ini hampir setiap saat. Perkembangan aplikasi media sosial yang semakin banyak dan semakin digemari semua kalangan ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi penggunanya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

C. Tinjauan tentang Opini Publik

1. Pengertian Opini

Opini menurut Cutlip dan center adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial (dalam Ollie dan Erlita, 2011, hlm 39). Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda. Opini adalah serapan dari bahasa asing (*opinion*). Merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata (*intangible*), baik dalam bentuk opini tertulis maupun lisan. Bisa juga sebagai perilaku, sikap tindak, pandangan dan tanggapan dan lain sebagainya.

2. Pengertian Publik

Istilah publik mempunyai arti sempit yang mewakili kelompok atau khalayak tertentu/terbatas sebagai objek sasarannya. Publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik melakukan interaksi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus,

surat kabar, radio, televisi dan film. Alat-alat penghubung ini memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya (dalam Ollie, 2011, hlm 21).

3. Pengertian Opini Publik

Noelle-Neumann mendefinisikan opini publik adalah sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak jika ia tidak ingin dirinya terisolasi; dalam hal kontroversial, opini publik adalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri yaitu berupa pengucilan (dalam Morissan, 2008, hlm 72). Untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian daripadanya. Selain dari pendapat-pendapat dan saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.

Menurut Emory Begardus opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan didalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan, dengan demikian berarti:

1. Opini publik itu bukan merupakan kata sepakat (*senstemimig, unanimous*)
2. Tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara “*numerical*” yakni berapa jumlah orang terdapat dimasing-masing pihak, sehingga mayoritas opini dapat disebut opini publik.
3. Opini publik hanya dapat berkembang dinegara-negara demokratis dimana terdapat kebebasan bagi tiap individu untuk menyatakan pendapatnya dengan lisan, tertulis, gambar-gambar, isyarat dan lambang-lambang lainnya yang dapat dimengerti (dalam Abdurrachman, 2001, hlm 51-52).

Kebebasan menyatakan opini pengembangannya dimasyarakat tidak akan lepas dari sistem pers yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dinegaranegara demokratis terdapat “*freedom of the pers*”, sehingga opini

yang dinyatakan publik dapat dikembangkan atau disebarluaskan dengan melalui pers (termasuk radio, film dan televisi bahkan fotografi). William Albright mengemukakan bahwa opini publik adalah hasil dari interaksi antara individu-individu dalam kelompok apa saja. Ini berarti bahwa opini publik itu timbul karena adanya interaksi antara individu-individu yang menyatakan pendapatnya (dalam Abdurrachman, 2001, hlm 51).

4. Jenis-jenis Opini Publik

Perilaku seseorang dengan sikapnya sangat erat kaitannya. Artinya perilaku seseorang yang banyak memiliki pengaruh dari kehidupan sehari-hari. Menurut Effendy, untuk memperoleh kejelasan mengenai opini publik perlu dikemukakan tentang jenis-jenis opini lainnya yang berkaitan dengan opini publik:

1. Opini individu merupakan pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju.
2. Opini Pribadi Merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Pendapat seseorang belum tentu merupakan opininya pribadi, mungkin ia ambil alih opini orang lain disebabkan ia menyetujuinya. Lalu dalam suatu pergunjungan dikomunikasikannya kepada orang lain sebagai opininya sendiri tetapi bukan opininya pribadinya.
3. Opini Kelompok Pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang termasuk sekelompok orang tadi.
4. Opini Mayoritas Pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah yang pro atau kontra. Mungkin yang punya penilaian lain. Biasanya berada disuatu forum terbuka dalam bentuk lembaga, misalnya parlemen sehingga bisa dihitung berapa jumlah yang pro dan kontra.
5. Opini Minoritas Kebalikan dari opini mayoritas. Opini minoritas adalah pendapat orang-orang relative dalam jumlahnya sedikit dibandingkan jumlah mereka terkait dengan suatu masalah sosial.
6. Opini Massa Merupakan tahap kelanjutan dari opini publik. Opini yang bersifat massa ini beralih bentuk menjadi tindakan fisik.

7. Opini Umum Pendapat umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum (dalam Soemirat dan Ardianto, 2012, hlm 107-108).

5. Karakteristik Opini Publik

Opini publik adalah pengumpulan citra yang diciptakan oleh proses komunikasi. Gambaran tentang sesuatu akan menimbulkan banyak tafsir para peserta komunikasi. Rudi Panuju (dalam Oliy, 2011, hlm 18)

a. Ciri-ciri Opini Publik

Astrid 1975 (dalam Oliy, 2011, hlm 23) menyatakan opini publik bersifat umum dan disampaikan oleh kelompok sosial secara kolektif dan tidak permanen. Istilah “publik” mengacu ke kelompok manusia yang berkumpul secara spontan dengan syarat-syarat :

1. Menghadapi persoalan tertentu
2. Berbeda opini mengenai persoalan tertentu dan berusaha mengatasinya
3. Mencari jalan keluar melalui diskusi karena setiap publik memiliki persoalan yang menuntut perhatian maka dengan sendirinya terbentuk banyak publik.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan atau sejenis yang ditinjau baik dari segi persamaan atau perbedaan dari proses dan hasil penelitiannya yang mengkaji tentang kaitannya dengan Peran Warga Negara Melalui Media Sosial Dalam Membentuk opini publik, diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi karya Syarif Fitri, Tuty Mutiah pada 1 April 2023 yang berjudul ”Berita Hoax Pada Media Facebook Dalam Membentuk Opini Masyarakat” Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian pada berita *hoax* merupakan tindakan memberikan informasi bohong kepada orang lain dilakukan secara sengaja. Sehingga dengan mudah berita *hoax* dapat menyebar dengan cepat, berita palsu di media sosial karena media sosial memiliki fasilitas media internet paling sering digunakan oleh pengguna

internet. Dengan menyebarkan ideologi tertentu untuk mendapatkan uang merupakan tujuan penyebaran berita *hoax*, sehingga bahwa adanya pengaruh berita *hoax* terhadap opini Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini maka penelitian saya memiliki relevansinya bahwa keduanya fokus pada objek penelitian yaitu peran media sosial pun dari topik yang dibahas masih mempunyai relevansi yaitu terkait berita *hoax*, tentu ini memberikan kontribusi secara pikiran atau pun secara landasan.

2. Penelitian skripsi karya Agita Tria Anggraeni, pada 2017 dengan judul “Pembentukan Opini Publik Di Media Sosial Twitter Dalam Pemenangan Kandidat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Studi di Posko Agus – Sylvi, Rumah Lembang dan Roemah Joeang)”. Pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan spin doctor dalam membentuk opini publik dan membentuk image Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 pada umumnya terlebih dahulu mengetahui rekam jejak sang kandidat, dan jajak pendapat tentang tingkat kepupuleran kandidat dalam rangka pembentukan pembentukan image (citra). Kandidat dihadapan publik atau khalayak pemilih. Berdasarkan data awal tersebut kemudian manajemen pembentukan image (citra) ini dilakukan oleh masing-masing tim spin doctor dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Disamping itu, strategi pembentukan image dilakukan melalui media sosial twitter sangatlah berpengaruh terhadap elektabilitas citra politikus. Namun, dalam kemenangan salah seorang kandidat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nyatanya tidak ditentukan oleh kemampuan dari tim spin doctor dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi dalam membentuk dan mempromosikan image melalui pesan-pesan politik kepada khalayak yang bersifat informatif dan persuasif. Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan sebuah pendapat bahwa penelitian ini menghasilkan yaitu bahwa citra dari seseorang bisa dibentuk sesuai apa yang diinginkan hingga akhirnya mempengaruhi opini publik, tentu ini membuat peneliti antusias untuk bagaimana menyelesaikan

skripsi peneliti karena melihat penelitian terdahulu ini menghasilkan bahwa opini publik di media sosial memiliki peranan dan pengaruhnya.

3. Penelitian skripsi karya Faqih Mualla Ahmad, pada 2023 dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum (Studi kasus Masyarakat Kota Malang)”. Pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian Peneliti menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara variabel media sosial terhadap variabel partisipasi politik, dimana arah pengaruh yaitu positif yang artinya bahwa media sosial meningkat maka meningkat pula variabel partisipasi politik. Berdasarkan penelitian ini penelitian Faqih memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya tentang peran warga negara dalam membentuk opini publik karena keduanya menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk pandangan dan tindakan masyarakat.
4. Penelitian skripsi karya Carla Mayrizka Chairunisa, pada 2017 dengan judul “*Political Branding* Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Melalui *New Media* (Studi Pada Kampanye Media Sosial Anies Baswedan – Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017)”. Hasil penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan bahwa strategi dari tim kampanye media sosial Anies – Sandi mengedepankan model kampanye *track record* atau rekam jejak guna menghadirkan kampanye dalam media sosial yang demokratis dan sejuk dalam *branding* terhadap opini publik.

Relasi antar aktor dalam konteks kampanye sangat berperan dalam membentuk citra politik Anies-Sandi pada Pilkada 2017, yang diaplikasikan melalui kampanye media sosial. Kampanye media sosial tidak semata-mata dilakukan sebagai sarana untuk mempresentasikan figur Anies-Sandi sebagai pemimpin yang ideal. Melainkan, bagaimana Relawan sebagai bagian dari tim sukses digital Anies-Sandi mampu mengolah konten yang interaktif, sehingga masyarakat yang tergabung dalam netizen mampu berpartisipasi secara politik. Partisipasi yang

diterapkan tidak hanya berupa dukungan suara, namun bagaimana mereka mampu secara aktif menanggapi fenomena politik yang sedang terjadi dewasa ini (*political awareness*), dan mampu mereproduksi konten tersebut menjadi suatu kajian yang informatif dan berpengaruh kepada sistem yang lebih makro yakni struktur politik. Sehingga, partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat kemudian memiliki dampak yang cukup berpengaruh dalam perubahan struktur politik di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada 2017. Berdasarkan hasil penelitian ini maka penelitian yang akan saya lakukan mendapat masukan bahwasanya media sosial memiliki pengaruhnya terhadap opini dalam ruang publik.

5. Penelitian skripsi karya Bayu Putro Wibowo, pada 2017 dengan judul “Partisipasi Politik Dalam Demokrasi Di Era Digital (Studi Pada Website Change.org Indonesia Sebagai Platform Petisi Online)”. Hasil penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh. Keberadaan Change.org mampu menjadi sebuah alternatif di dalam penyampaian aspirasi masyarakat di dalam era digital saat ini. dengan tingginya pengguna internet yang ada di Indonesia serta bagaimana kemajuan teknologi telah menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat kehadiran Change.org sebagai bentuk wadah dalam menyampaikan aspirasi dalam bentuk petisi online mampu memberikan penyebaran yang lebih luas di dalam penggunaannya. Maraknya platform online, Change.org menjadi sebuah alat perjuangan yang memiliki tingkat keefektifan lebih di dalam penyebaran informasi ketimbang platform lain, Serta penggunaan yang mudah menjadi bagaimana kehadirannya menjadi sebuah wadah dalam penyampaian informasi. Dalam kehadirannya Change.org membantu bagaimana berjalannya demokrasi di Indonesia, dengan adanya platform online yang menjadikan petisi sebagai senjata utama di dalam website kehadiran change.org mampu membantu masyarakat dapat lebih aktif di dalam praktik demokrasi, melalui penyampaian aspirasi, memberikan pendapat, serta petisi sebagai bentuk tuntutan di dalam perjuangannya lebih dari itu melalui ranah virtual ini kehadiran Change.org mampu dirasakan oleh para penggunanya dalam

mencari dukungan dengan waktu singkat dan mudah kepada masyarakat untuk mendukung petisi tersebut sehingga mampu mendorong terhadap penyebaran yang lebih besar guna menuntut adanya perubahan oleh pemerintah dalam permasalahan sosial yang dibuat oleh pengguna merupakan sebuah tindakan yang legal. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E dan F mengenai kebebasan berpendapat, menyebar dan memperoleh informasi sebagai hak warganegara. Lebih dari itu dengan media digital sebagai alat perjuangan hal tersebut pun diatur di dalam Undang-Undang ITE pada pasal 3,6,7 yang merupakan pemanfaatan teknologi dan pemilihan teknologi serta kehadiran media digital mampu memberikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sebuah platform online change.org mampu mengajak Masyarakat untuk dapat berkontribusi di dalam berjalannya kehidupan bernegara. melalui demokrasi digital sebagai bentuk transformasi demokrasi di tengah kemajuan teknologi kehadiran change.org menjadi alternatif di dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. petisi yang merupakan sebuah tindakan legal di dalam partisipasi politik politik masyarakat dengan menuntut pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap permasalahan sosial yang ada dengan bantuan melalui penandatanganan dari para pengguna change.org.

Kehadiran media digital serta bagaimana demokrasi digital mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi, kehadiran informasi menjadi begitu membengkak di dalam era digital, hal tersebut kerap menimbulkan permasalahan terkait hadirnya informasi-informasi yang berindikasi adanya kebohongan yang dilakukan segelintir oknum. Kehadiran berita hoax sebagai sisi negatif demokrasi digital mampu mencederai demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa penelitian Bayu Putro Wibowo relevan dengan penelitian saya karena keduanya membahas tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik. Meskipun fokus penelitian berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam melihat media sosial sebagai alat yang ampuh untuk mobilisasi masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik.

6. Penelitian skripsi karya Muhammad Fauzan Afrizal, pada 2017 dengan judul “Konstruksi Realitas Sosial Oleh Media Massa (Studi Opini Mahasiswa PPKn UNJ Atas Pemberitahuan Joko Widodo di Metro TV)”. Hasil penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa Metro TV merupakan bagian dari media massa yang di Indonesia yang terlibat aktif dan selalu memberikan informasi dan pemberitaan dalam hal politik, tidak terkecuali mengenai pemberitaan mengenai kinerja pemerintahan Jokowi saat ini. Masyarakat mengetahui berbagai berita mengenai kinerja pemerintahan saat ini melalui pemberitaan di media massa dan salah satunya melalui Metro TV yang akhirnya akan membentuk sebuah kesimpulan di masyarakat setelah menyaksikan pemberitaan yang ditayangkan. Mahasiswa PPKn UNJ merupakan bagian kecil dari masyarakat yang turut aktif menyaksikan dan mengikuti pemberitaan mengenai pemerintahan di Metro TV. Keberadaan Metro TV memberikan sebuah kesempatan untuk para mahasiswa dapat mengetahui pemberitaan dan informasi mengenai kinerja pemerintahan. Pemberitaan mengenai kinerja pemerintahan menggambarkan dan membentuk pandangan mereka terhadap apa yang mereka lihat yang nantinya akan menjadi sebuah penilaian dari dalam diri mahasiswa tersebut. Dalam penulisan ini, penulis melakukan observasi untuk dapat mengetahui pemberitaan apa saja yang ditayangkan oleh Metro TV dalam program berita Metro Pagi, Metro Siang, Primetimes News dan Metro Malam dimana dalam program berita tersebut memungkinkan adanya berita mengenai pemerintahan Jokowi Dodo dalam seminggu terakhir. Observasi ini akan menghasilkan setidaknya gambaran pemberitaan apa yang muncul dan isi dari berita tersebut. Pemberitaan yang diangkat ini adalah berita yang ditayangkan per 10 Mei 2017 hingga 15 Mei 2017. Dalam seminggu pengamatan, penulis mendapati 14 pemberitaan mengenai pemeritahan di Metro TV dalam berbagai macam tayangan pemberitaannya. Hampir seluruh pemberitaan yang tayang di Metro TV mengenai sisi baik pemerintahan dan lebih banyak menayangkan kinerja atau program apa yang sedang atau sudah dilakukan pemerintahan dan

sedikit pula pemberitaan yang mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Pemberitaan di Metro TV dianggap bisa menjadi sebuah acuan real dalam menilai sesuatu karena seorang individu tidak dapat melihat langsung atau merasakan langsung mengenai apa yang terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya, pembentukan opini yang terjadi di masyarakat atas pemberitaan media akan membentuk sebuah sikap tertentu kepada satu peristiwa atau pemberitaan. kepada pemerintahan saat ini. Pemberitaan yang diterima oleh mahasiswa PPKn UNJ dari Metro TV membentuk sebuah gambaran bagi para mahasiswa dalam menilai pemerintahan. Dalam penulisan ini, terdapat penilaian baik mengenai kinerja pemerintahan Jokowi dalam pandangan para mahasiswa PPKn UNJ yang menjadi informan dalam penulisan ini. pandangan baik ini tak terlepas dari pemberitaan yang diberikan oleh Metro TV. Pemerintahan Jokowi dianggap mampu menjalankan tugasnya sebagai membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dalam penilaian para informan, kinerja pemerintahan Jokowi sudah sangat baik walaupun mereka hanya melihat kinerja pemerintahan melalui pemberitaan yang ada. Penilaian baik atau opini para mahasiswa PPKn UNJ terhadap pemerintahan tak terlepas dari kemampuan media massa untuk membentuk atau mengkonstruksi realitas yang ada. Pembentukan realitas dilalui melalui berbagai macam tahap yang dilewati oleh para informan secara tidak mereka sadari. Dalam tahap pertama, pemberitaan yang diberikan Metro TV memberikan sebuah berita atau informasi kepada para informan mengenai kinerja pemerintahan. Saat berita tersebut sudah diterima oleh informan maka akan terjadi membenaran dalam diri informan terhadap pemberitaan yang ada. Pemberitaan mengenai kinerja pemerintahan yang baik akan diterima oleh para informan dan dibenarkan oleh para informan sehingga akan terbentuk sebuah penerimaan terhadap pemberitaan yang diberikan Metro TV kepada informan. Setelah tahap membenaran berita adalah tahap dimana kesediaan dikonstruksi oleh media massa, pada tahap ini ketersediaan informan untuk di konstruksi terjadi karena kesadaran mereka akan kebutuhan informasi dan berita mengenai pemerintahan. Selain itu, ketersediaan dikonstruksi tak terlepas dari

menjadikan Metro TV sebagai acuan mereka dalam mencari berita. Metro TV sebagai sebuah referensi pemberitaan yang utama untuk mencari pemberitaan mengenai pemerintahan Jokowi sehingga apapun pemberitaan yang diterima oleh mereka dapat mereka terima dengan baik. Hal ini terjadi karena kesediaan mereka untuk dikonstruksi oleh pemberitaan di Metro TV. Ketersediaan mereka terlihat dengan bagaimana mereka menjadikan Metro TV sebagai saluran pemberitaan utama mereka dan bagaimana mereka dapat menerima pemberitaan yang ditayangkan sehingga dari tahapan ini akan membentuk pandangan dan pemikiran mereka mengenai pemerintahan Jokowi. pembentukan konstruksi juga dilatarbelakangi seberapa sering frekuensi individu menyaksikan media massa. Karena semakin sering menyaksikan media massa, semakin sering mendapatkan informasi dan semakin banyak menerima informasi yang sama maka akan semakin terbentuk pemikiran mereka terhadap sesuatu yang dibentuk oleh media massa.

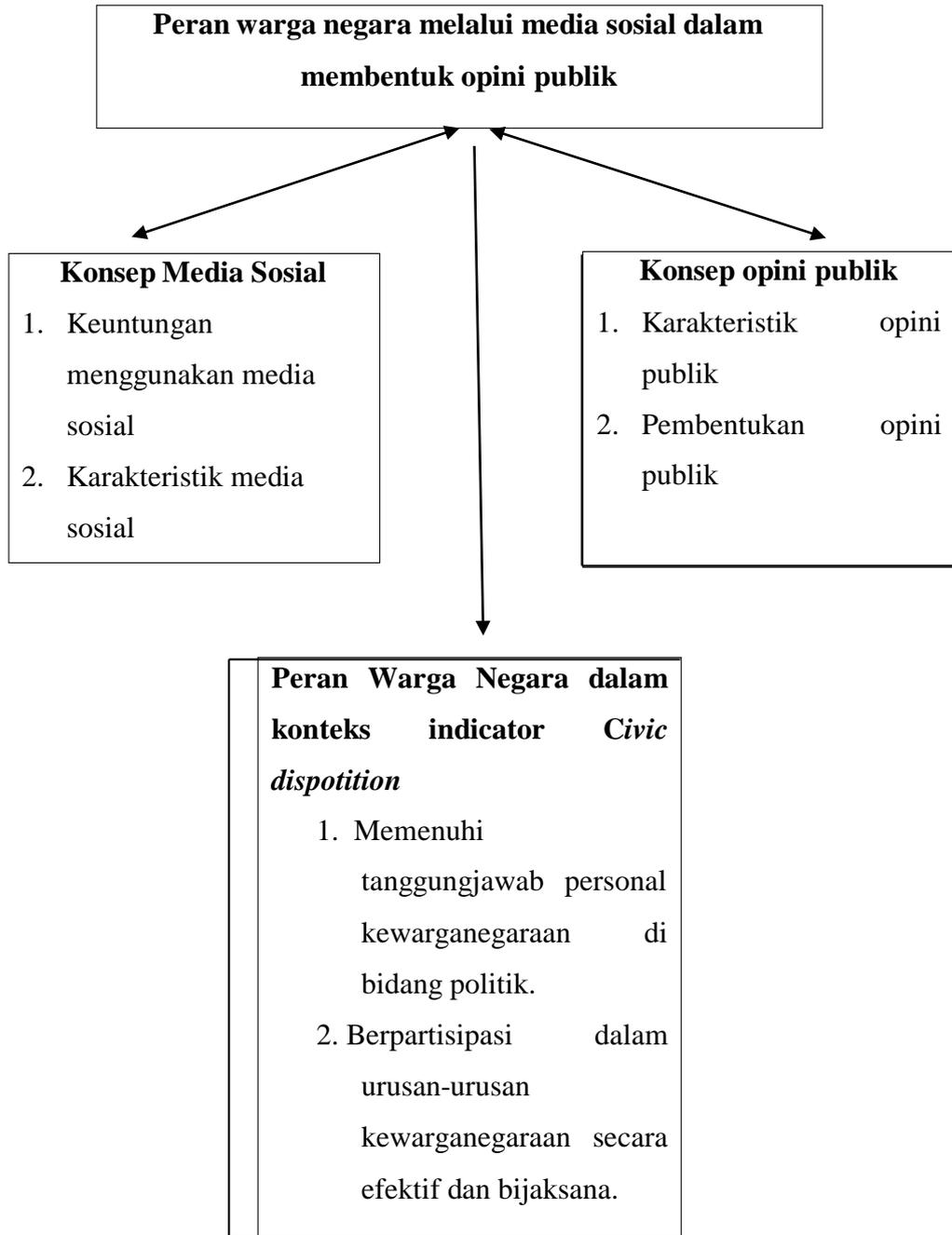
Dalam tahapan ini, informan menyaksikan pemberitaan di Metro TV sebanyak 2-4 jam dalam sehari. Keseharian para informan yang selalu melakukan aktifitas diluar membuat keterbatasan waktu untuk menyaksikan pemberitaan di Metro TV tidak begitu banyak. Namun, dengan frekuensi waktu yang hanya 2-4 jam sehari menyaksikan Metro TV membuat hal tersebut diharuskan atau menjadi rutin setiap harinya. Terjadinya kecenderungan individu atau massa untuk terkonstruksi dan mengikuti apa saja yang diberikan oleh sebuah pemberitaan melalui pembentukan citra menjadi titik dimana media massa dapat merubah opini atau membentuk opini informan hanya dengan sekedar menyaksikan sebuah pemberitaan tanpa harus melihat langsung bagaimana kinerja pemerintahan saat . Tak hanya itu saja, yang harus dipahami adalah bahwa semua opini yang terbentuk didalam informan tak lebih dari opini yang cenderung apriori yang sekedar asumsi atau gambaran tanpa merasakan atau mengetahui langsung. Melalui dampak yang terjadi kita dapat menggambarkan bahwa media massa memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa dalam membentuk sebuah realitas di masyarakat. Tanpa disadari

media massa tak hanya menjadi sebuah saluran informasi namun juga menjadi pembentuk realitas sosial dimasyarakat. Berdasarkan penelitian ini maka penelitian Fauzan Afrizal memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana media massa, khususnya televisi, membentuk opini publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya literasi media agar masyarakat dapat mengkritisi informasi yang mereka terima dan membentuk opini yang lebih rasional tentu ini memiliki relevansi dengan penelitian saya pun juga penelitian ini memberikan masukan kepada penelitian saya agar lebih mendalam dalam mengambil peranan media sosial atau media massa mana yang akan diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu dasar pemikiran yang menjelaskan penggabungan antara fakta dengan teori, observasi, dan kajian pustaka sehingga pada akhirnya menjadi sebuah konsep dasar dalam kegiatan penelitian (Abdhal, Y., 2022, hlm 1). Kemudian menurut Sujarweni, V. W., (2020, hlm 60) kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu konsep dasar dalam sebuah penelitian sebagai gambaran sementara agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti peran media sosial terutama Twitter dalam pembentukan opini publik di masyarakat. Sehingga, peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan jauh mengenai bagaimana media sosial dapat mempengaruhi seseorang dan membentuk pendapat mereka sendiri. Karena menurut kominfo, Indonesia menduduki peringkat ke-4 tertinggi sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Menurut peneliti, peran media sosial dalam pembentukan opini publik di masyarakat akan cukup besar karena melihat perkembangan teknologi serta penikmat media yang semakin hari semakin banyak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti (2024)